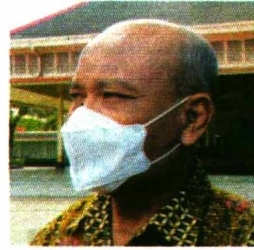




Pemkot Copot Baliho Bergambar Haryadi

PEMKOT Jogja bergegas mengambil langkah agar pelayanan terhadap masyarakat tetap kondusif. Ini menyusul ditetapkannya mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) dan Kepala DPMPSTSP Kota Jogja Nurwidhihartana sebagai tersangka kasus suap oleh KPK. Langkah pertama pemkot adalah mencopot baliho yang memuat gambar HS di halaman depan Balai Kota Timoho. Pencopotan dilakukan kemarin (3/6) sekitar pukul 10.00 ■

► Baca Pemkot... Hal 2



ANTISIPASI: Penjabat (PJ) Wali Kota Jogja Sumardi segera mengambil langkah agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.

HS DALAM PUSARAN KASUS KORUPSI

5 Agustus 2015

- HS menjadi saksi kasus korupsi dana hibah KONI Kota Jogja untuk PBVSI Jogja.
- Dalam kesaksiannya, HS mengaku tidak mengetahui ke mana saja aliran dana hibah KONI Jogja untuk PBVSI sebesar Rp 250 juta. Alasannya, ia bukan pengurus KONI.

23 Januari 2020

Sidang di Tipikor Jogjakarta. Kasus suap lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan, Kepala DPUPKP Kota Jogja saat itu Agus Tri Haryono disebut meminta fee sebesar 0,5 persen untuk disetorkan ke HS.

12 Februari 2020

Lanjutan sidang. Giliran Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Kota Jogja Aki Lukman Noor Hakim menyebut ada pembicaraan memintakan fee 0,5 persen untuk HS

27 Februari 2020

- Karena namanya disebut, HS menjadi saksi. HS membantah keterangan saksi sebelumnya. Dia tidak pernah memerintahkan jatah fee yang dimaksud dalam kode. Apalagi menerima besaran fee 0,5 persen dari proyek yang terjaring OTT KPK pada Agustus 2019.
- Dalam persidangan juga sempat ditunjukkan barang bukti percakapan telepon antara HS dengan Agus. Dalam percakapan itu mengkomunikasikan mengenai informasi kaitannya perizinan salah satu villa.
- HS mengkonfirmasi bahwa permasalahan itu sudah lama terkait Greenhouse Villa. Permasalahan antara Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan DPUPKP.

Kamis, 2 Juni 2022, pukul 12.00

HS ditangkap KPK. Kasus suap perizinan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro.

Jumat, 3 Juni 2022

HS bersama tiga orang lainnya dijadikan tersangka.

GRAFIS: HERPRI KARTUNRADAR JOGJA

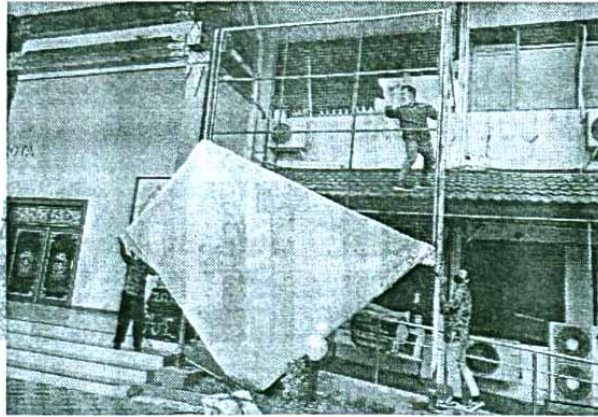
Pemkot Copot Baliho Bergambar Haryadi

Sambungan dari hal 1

Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sumadi menyebut, langkah selanjutnya yang dipersiapkan pemkot adalah menetapkan pelaksana harian (plh). Dia mengaku sudah berkoordinasi, mengantisipasi pejabat pemkot yang ditetapkan sebagai tersangka.

Dijelaskan, ketika pejabat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, posisinya menjadi kosong. Maka Pj akan menunjuk pejabat lain sebagai pelaksana tugas dari dinas yang bersangkutan. Penunjukan pun akan dilakukan dalam waktu dekat. "Penunjukan paling tidak Senin. Yang penting pelayanan terhadap masyarakat itu tidak berhenti," ujar Sumadi dihubungi wartawan kemarin (3/6).

Menyoal izin IMB Royal Kedaton yang jadi musabab HS di-OTT KPK, Sumadi mengaku belum bisa memutuskan. Tapi, temuan ini jadi pemantik Sumadi untuk melakukan evaluasi. Utamanya dalam penerbitan izin mendirikan bangunan



CORENG JOGJA: Pemkot Jogja mencopot baliho yang memuat gambar Haryadi Suyuti di halaman depan Balai Kota Timoho, kemarin (3/6).

(IMB). "Pada prinsipnya, kami akan melihat dan mencermati terhadap izin yang sudah dikeluarkan (masa HS, Red)," lontar Sumadi.

Pencermatan akan dilakukan dengan verifikasi lapangan. Jika kembali ditemukan ada yang melanggar, akan dilakukan penyesuaian. Termasuk pada bangunan di luar apartemen dan hotel. "Kalau ada dugaan yang dikeluarkan tidak sesuai ketentuan, kami cermati. Sudah ada

nggak usah macam-macam. Ngapain diangel-angel, jangan mengundang hasrat orang jual beli itu (perizinan, Red)," seghanya.

Danang menegaskan pula, peraturan yang dibuat untuk ditaati. Sebab sudah melalui tahapan yang panjang. Mulai dari mengkaji naskah secara akademis, nilai politis, dan historis. "Saat sudah memenuhi syarat, waktunya diundur-undur buat apa?," ucapnya.

Selanjutnya ia berharap OTT KPK terhadap HS cs tidak merembet. Sebab, kasus ini telah mencoreng imej Kota Jogja. "Ini menjadi pembelajaran yang cukup berharga dan mahal bagi Jogja. Kota Jogja yang demikian baiknya, tercoreng betul dengan kasus suap ini," tandasnya.

Dari pengamatan *Radar Jogja*, DPMP masih memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, DPUPK juga masih membuka layanan. Kendati ruang kepala dinas pada keduanya disegel KPK. Selain itu, KPK juga menyegel rumah dinas dan ruang Wali Kota Jogja. (fat/laz/rg)

perda baru terkait dengan perizinan. Untuk beberapa yang sudah ada bangunannya, akan kami sesuaikan dengan perda baru," ucapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudyatmoko mengatakan, ASN semestinya mengerjakan tugas sesuai tupoksi. Sebagai unsur pengawasan dan pembuat regulasi daerah, politisi PDIP ini menilai perizinan di Kota Jogja semestinya gampang. "Saya harapkan ASN

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005